Community Engagement & Emergence Journal
Volume 7 Nomor 2, Tahun 2026
Halaman : 1390-1397

Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Komunikasi Publik Di Kabupaten Sikka

Implementation Of The Digital Population Identity (IKD) Policy To Enhance Population Administration Services Through Public Communication In Sikka Regency

Markus Kristian Retu[a], Victor Ariestyan Sedu[b]
Universitas Nusa Nipa[a,b]
tianslash@ymail.com[a]

Abstract

Population administration services constitute an essential form of public service that plays a vital role in ensuring legal certainty and the fulfillment of every citizen's administrative rights. In line with the advancement of information technology, the Indonesian government has introduced service innovations through the implementation of ***Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD)*** *as part of the digital transformation of public services. This research report aims to describe the implementation of population administration services through IKD at the Population and Civil Registration Office of Sikka Regency and to identify the benefits and challenges encountered during its implementation. This study employed a descriptive research method. Data were collected through direct observation, active participation in population administration service delivery, documentation, and community assistance during the registration and activation of IKD. The research roadmap focuses on information governance, public communication, public service, government policy, and digital transformation. The findings indicate that the implementation of IKD has improved the effectiveness of population administration services by providing easier access to digital identity, accelerating service processes, enhancing data security, and increasing administrative efficiency through accurate, communicative, and citizen-oriented information delivery. Nevertheless, several challenges remain, including low levels of digital literacy among the public, limited ownership of smartphones compatible with the IKD application, and unstable internet connectivity that affects the registration and activation processes. Therefore, greater efforts are required to strengthen public outreach and education, as well as to improve information technology infrastructure, to optimize the implementation of IKD and support the realization of high-quality, effective, and digitally based population administration services.*

Keywords: *Population Administration; Digital Population Identity (IKD); Public Service; Digitalization; Population and Civil Registration Office.*

Abstrak

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak administrasi setiap warga negara. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah mengembangkan inovasi pelayanan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital. Laporan Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka serta mengidentifikasi manfaat dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif pada Peneltian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, partisipasi aktif dalam pelayanan administrasi kependudukan, dokumentasi, dan pendampingan kepada masyarakat selama pelaksanaan registrasi serta aktivasi IKD. Roadmap penelitian ini fokus pada tata kelola informasi, komunikasi publik, pelayanan publik, kebijakan pemerintah, serta transformasi digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi IKD mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan melalui kemudahan akses identitas digital, percepatan proses pelayanan, peningkatan keamanan data, serta efisiensi penyelenggaraan administrasi sesuai dengan penyampaian informasi yang tepat, Komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, implementasi IKD masih menghadapi

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kepemilikan perangkat telepon pintar yang mendukung aplikasi IKD, serta gangguan jaringan internet yang memengaruhi kelancaran proses registrasi dan aktivasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, dan penguatan infrastruktur teknologi informasi agar implementasi IKD dapat berjalan lebih optimal serta mendukung terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, efektif, dan berbasis digital.
Kata kunci: Administrasi Kependudukan; Identitas Kependudukan Digital; Pelayanan Publik; Digitalisasi; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Pendahuluan

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui penerbitan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan dokumen pencatatan sipil lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan secara tertib, akurat, dan berkelanjutan. Pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi kependudukan (Mulyanto Angkat, K., Kadir, A., & Isnaini, 2018).

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah melakukan transformasi pelayanan administrasi kependudukan melalui penerapan **Identitas Kependudukan Digital (IKD)**. IKD merupakan identitas elektronik yang memuat data kependudukan dan dapat diakses melalui aplikasi digital sebagai pengganti identitas fisik. Penerapan IKD bertujuan mengikuti perkembangan teknologi informasi, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan, mempermudah pelayanan publik, serta menjamin keamanan data masyarakat melalui sistem autentikasi digital (Pieter Liman Hege, 2024). Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, IKD juga diharapkan mampu mengurangi penggunaan blanko KTP-el dan mempercepat akses masyarakat terhadap berbagai layanan administrasi kependudukan.

Sebagai instansi penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka telah mengimplementasikan pelayanan berbasis IKD sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Disdukcapil Kabupaten Sikka memiliki tugas mengelola data kependudukan, memberikan pelayanan dokumen kependudukan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pelayanan yang cepat, mudah, ekonomis, dan memberikan kepastian menjadi harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan (Rame et al., 2022).

Meskipun demikian, implementasi IKD masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa masyarakat belum memahami manfaat dan prosedur penggunaan IKD, masih terbatasnya kepemilikan perangkat telepon pintar, serta adanya gangguan jaringan internet yang menyebabkan proses registrasi dan aktivasi IKD belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber

daya manusia, kualitas pelayanan, dan literasi digital masyarakat (Pieter Liman Hege, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, implementasi Identitas Kependudukan Digital menjadi salah satu inovasi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pelayanan IKD, manfaat yang diperoleh masyarakat, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya sebagai upaya mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan berbasis digital.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Deskriptif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu dari 10 Februari sampai 10 April 2026, dengan focus penelitian pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK). Selama penelitian mengikuti jam kerja instansi setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 07.30–16.00 WITA

Penelitian ini diawali dengan pengurusan surat tugas dari LP2M dan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Nipa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. Setelah diterima, peneliti mengikuti proses orientasi, pengenalan lingkungan kerja, penelitian pada bidang yang telah ditentukan.

Selama kegiatan, peneliti terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas pelayanan administrasi kependudukan, terutama pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kegiatan yang dilakukan meliputi membantu registrasi dan aktivasi IKD, memberikan informasi publik kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan, melakukan legalisasi dokumen kependudukan, membantu pengisian formulir administrasi, memeriksa kelengkapan berkas, melakukan registrasi akta kelahiran dan akta kematian, serta membagikan survei kepuasan masyarakat. Melalui keterlibatan langsung tersebut, peneliti memperoleh pengalaman praktis mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital sekaligus memahami berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Sikka.

3. Hasil Penelitian

Pelaksanaan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka selama kurang lebih tiga bulan, yaitu mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan 15 Desember 2025. Selama kegiatan berlangsung, penulis ditempatkan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kependudukan berbasis teknologi informasi serta pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui penempatan tersebut, penulis memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Selama pelaksanaan magang, penulis berpartisipasi dalam proses registrasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kegiatan ini dimulai dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk mengunduh aplikasi IKD, melakukan pengisian Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat surat elektronik

(email), dan nomor telepon, dilanjutkan dengan proses verifikasi data menggunakan teknologi *face recognition*, pemindaian QR Code, hingga aktivasi akun melalui email. Seluruh tahapan tersebut dilakukan sesuai prosedur pelayanan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Selain membantu pelayanan IKD, penulis juga melaksanakan berbagai aktivitas administrasi lainnya, antara lain melakukan legalisasi dokumen kependudukan, membantu pelayanan pengisian formulir perpindahan penduduk, memeriksa kelengkapan berkas kehilangan KTP elektronik, melakukan registrasi akta kelahiran dan akta kematian, mencatat barang yang keluar dari gudang peralatan, membagikan survei kepuasan masyarakat, serta mengikuti kegiatan kerja bakti rutin bersama pegawai Disdukcapil. Berbagai aktivitas tersebut memberikan pengalaman praktis mengenai mekanisme pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada masyarakat.

Peran Mahasiswa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

Selama kegiatan magang, penulis tidak hanya membantu proses administrasi, tetapi juga berperan sebagai pendamping masyarakat dalam memahami penggunaan aplikasi IKD. Penulis memberikan informasi mengenai prosedur pendaftaran, menjelaskan manfaat IKD, mengarahkan masyarakat menuju loket pelayanan yang sesuai, serta membantu menyelesaikan berbagai kendala administratif yang dihadapi masyarakat selama proses pelayanan berlangsung. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi yang baik antara petugas pelayanan dengan masyarakat.

Hasil Implementasi Identitas Kependudukan Digital

Hasil pelaksanaan pelayanan menunjukkan bahwa penerapan Identitas Kependudukan Digital memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan. Masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses identitas kependudukan melalui telepon pintar sehingga tidak selalu bergantung pada dokumen fisik. Proses pelayanan menjadi lebih cepat karena data kependudukan telah terintegrasi secara elektronik dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain itu, penggunaan autentikasi digital melalui QR Code dan verifikasi biometrik meningkatkan keamanan identitas masyarakat sehingga meminimalkan risiko pemalsuan dokumen.

Bagi instansi, implementasi IKD memberikan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, terutama dalam mengurangi penggunaan blanko KTP elektronik dan mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital. Pelaksanaan IKD juga mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kendala Pelaksanaan Pelayanan IKD

Meskipun implementasi IKD memberikan berbagai manfaat, pelaksanaan pelayanan masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang, sebagian masyarakat belum memahami manfaat maupun prosedur penggunaan IKD sehingga petugas harus memberikan pendampingan secara

langsung pada setiap tahapan registrasi. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki perangkat telepon pintar yang kompatibel dengan aplikasi IKD sehingga belum dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal.

Kendala lainnya adalah gangguan jaringan internet yang menyebabkan proses registrasi maupun aktivasi IKD menjadi terhambat. Dalam beberapa kondisi, proses verifikasi biometrik maupun sinkronisasi data memerlukan waktu yang lebih lama sehingga berdampak terhadap kecepatan pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IKD tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknologi dan tingkat literasi digital masyarakat.

Temuan Utama

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang, dapat disimpulkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka telah berjalan sesuai prosedur pelayanan yang berlaku dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Digitalisasi pelayanan melalui IKD mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pelayanan, mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan, serta mendukung keamanan data identitas. Namun demikian, optimalisasi implementasi IKD masih memerlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan literasi digital, serta peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi agar pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pembahasan

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu bentuk transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selama pelaksanaan magang, penulis terlibat secara langsung dalam proses registrasi dan aktivasi IKD, mulai dari pendampingan masyarakat dalam mengunduh aplikasi, pengisian data identitas, verifikasi biometrik (*face recognition*), pemindaian QR Code, hingga proses aktivasi akun melalui surat elektronik. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sikka.

Penerapan IKD menunjukkan adanya perubahan pola pelayanan dari sistem administrasi konvensional menuju pelayanan berbasis teknologi informasi. Sebelumnya masyarakat lebih bergantung pada dokumen fisik, sedangkan melalui IKD masyarakat dapat menyimpan identitas kependudukan secara digital pada perangkat telepon pintar. Transformasi tersebut memberikan kemudahan dalam mengakses dokumen kependudukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus membawa dokumen fisik. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih efisien, praktis, dan sesuai dengan arah digitalisasi pelayanan publik yang sedang dikembangkan pemerintah.

Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan IKD memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Sikka. Proses pelayanan menjadi lebih cepat karena data kependudukan telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain itu, proses verifikasi identitas menggunakan QR Code dan autentikasi biometrik mampu meningkatkan keamanan data kependudukan sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan identitas.

Dari sisi organisasi, penerapan IKD turut mendukung efisiensi penyelenggaraan pelayanan. Penggunaan identitas digital berpotensi mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen fisik sehingga dapat menekan penggunaan blanko KTP-el serta biaya operasional pelayanan. Kondisi ini sejalan dengan tujuan penerapan IKD, yaitu meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan, mempercepat pelayanan publik, serta memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat melalui sistem autentikasi elektronik.

Peran Komunikasi dalam Pelayanan IKD

Selama kegiatan magang, penulis menemukan bahwa keberhasilan implementasi IKD tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi antara petugas pelayanan dan masyarakat. Dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat masih membutuhkan pendampingan ketika melakukan registrasi maupun aktivasi IKD. Oleh karena itu, petugas pelayanan harus mampu memberikan penjelasan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami mengenai manfaat, prosedur, serta tahapan penggunaan aplikasi IKD.

Selain memberikan pelayanan administratif, petugas juga berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mengatasi kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Penulis juga terlibat dalam memberikan arahan kepada masyarakat mengenai lokasi pelayanan dokumen kependudukan lainnya, membantu menjawab pertanyaan masyarakat, serta memberikan penjelasan mengenai prosedur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Sikka.

Kendala Implementasi Identitas Kependudukan Digital

Meskipun memberikan berbagai manfaat, implementasi IKD masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang, kendala pertama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat IKD. Sebagian masyarakat masih lebih percaya menggunakan KTP elektronik dalam bentuk fisik dibandingkan identitas digital sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan kepemilikan perangkat telepon pintar yang kompatibel dengan aplikasi IKD. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat yang memenuhi spesifikasi aplikasi sehingga belum dapat melakukan aktivasi identitas digital. Selain itu, gangguan jaringan internet pada saat proses registrasi maupun sinkronisasi data menyebabkan pelayanan terkadang berlangsung lebih lama dibandingkan yang direncanakan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada sistem aplikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.

Kontribusi Program Magang terhadap Kompetensi Mahasiswa

Pelaksanaan magang di Disdukcapil Kabupaten Sikka memberikan pengalaman praktis yang tidak diperoleh melalui pembelajaran di kelas. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung mekanisme pelayanan administrasi kependudukan, prosedur penerapan IKD, serta sistem kerja birokrasi pemerintahan. Selain meningkatkan kemampuan teknis dalam pelayanan administrasi, kegiatan magang juga mengembangkan kemampuan komunikasi, pelayanan masyarakat, kerja sama tim, kedisiplinan, dan penyelesaian masalah yang muncul selama proses pelayanan.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa program MBKM mampu menjembatani teori yang diperoleh di perguruan tinggi dengan praktik kerja di lapangan. Keterlibatan mahasiswa dalam pelayanan publik juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan melalui pendampingan kepada masyarakat dalam penggunaan Identitas Kependudukan Digital. Dengan demikian, kegiatan magang tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai proses pembelajaran, tetapi juga mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Sikka.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, dapat disimpulkan bahwa implementasi **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang mendukung transformasi digital dalam administrasi kependudukan. Penerapan IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara elektronik, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mendukung keamanan data melalui sistem verifikasi dan autentikasi digital. Pelaksanaan pelayanan berbasis IKD juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Selama pelaksanaan magang, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam proses pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pada registrasi dan aktivasi IKD, pelayanan legalisasi dokumen, pemeriksaan kelengkapan berkas, serta pemberian informasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman mengenai mekanisme pelayanan publik, pentingnya komunikasi yang efektif dengan masyarakat, serta penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam mendukung pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan efisien.

Meskipun implementasi IKD telah memberikan berbagai manfaat, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan IKD, keterbatasan kepemilikan perangkat telepon pintar yang mendukung aplikasi, serta gangguan jaringan internet yang dapat menghambat proses registrasi dan aktivasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan literasi digital, serta peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi agar implementasi IKD dapat berjalan lebih optimal.

Secara keseluruhan, kegiatan magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tidak hanya memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan bidang ilmu yang dipelajari, tetapi juga meningkatkan kompetensi mahasiswa

dalam aspek pelayanan publik, komunikasi, kerja sama, dan profesionalisme. Program magang ini menjadi sarana yang efektif untuk menghubungkan pengetahuan akademik dengan praktik kerja di lapangan sekaligus memberikan kontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Daftar Pustaka

Di, K., & Alla, K. (2018). *Kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.*

Dwiyanto, A. (2018). *Tujuan administrasi publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat*. *Ilmu Administrasi Negara, 10*(2), 85–95.

Hermanses, U., & Soselisa, P. S. (2023). *Pelayanan administrasi kependudukan di Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat*, *10*(2), 429–444.

Ii, B. A. B. (2023). *Pendampingan pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Rungkut Kidul guna meningkatkan pelayanan adminduk berbasis digital*, *25*, 18–31.

Intan Mustafa. (2024). *Komunikasi pelayanan publik Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH), 4*(3).

Iqbal, M., & Mirza, T. (2024). *Digitalisasi pelayanan publik dalam sektor pelayanan kependudukan*, 62–68.

Marfu'ah, S., Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2022). *Digitalisasi pelayanan publik: Ketidaksiapan masyarakat dalam penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Bojonegoro*. *Ilmu Administrasi, 15*(2), 1–12.

Mulyanto Angkat, k., Kadir, A., & Isnaini, I. (2018). Analisis pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kependududkan dan pencatatan sipil kab. dairi. *Administrasi Publik*, *7*(1), 33–48

Nur Astuti Wijareni, S. A. I. (n.d.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUDKAN DIGITAL IKD PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KUDUS*

Pieter Liman Hege, A. M. (2024). *Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Menggunakan Gawai Pintar*

Putri, R. A., & Hidayat, M. (2020). fungsi pelayanan administrasi publik dalam meningkatkan kualitas layaanan kepada masyarakat. *ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*, *6*(1), 33–45

Siti Marfu'ah, Ana Kumalasari, & Ida Swasanti. (2024). Digitalisasi Pelayanan Publik : Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Bojonegoro. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, *15*(02), 271–283. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.12309